

KAPASITAS MANAJEMEN PROGRAM DAN PROSES PEMERINTAH DESA JANGKURANG DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN BLT DANA DESA

Shinta Nuradha Azzahra^{1(a)}, Dedi Sukarno^{2(b)}

^{1,2}Jurusan Administrasi Publik, Universitas Padjadjaran
^{a)}shinta20004@mail.unpad.ac.id, ^{b)}dedi.sukarno@unpad.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

31-01-2024

Diterbitkan Online:

01-11-2024

Kata Kunci:

Kapasitas Organisasi,
Manajemen Program,
Manajemen Proses, BLT-DD

Keywords:

Organizational Capacity,
Program Management,
Process Management, BLT-DD

Corresponding Author:

shinta20004@mail.unpad.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v6i3.956>

ABSTRAK

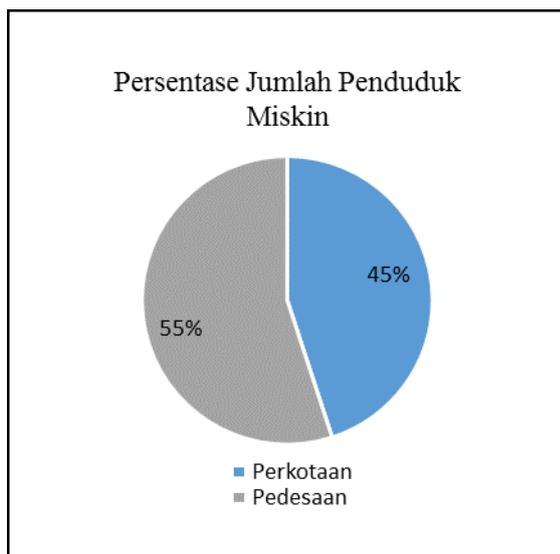
Dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Indonesia menetapkan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dengan tujuan memberikan bantuan tunai langsung kepada penduduk di daerah pedesaan atau terpencil, salah satunya Desa Jangkurang. Dalam menyelenggarakan pelayanan BLT-DD, dibutuhkan kapasitas organisasi yang baik dari Pemerintah Desa Jangkurang, khususnya pada manajemen program dan manajemen proses. Namun, pada pelaksanaannya ternyata belum memadai. Tujuan riset ini adalah menjelaskan lebih lanjut mengenai kapasitas manajemen program dan proses pada Pemerintah Desa Jangkurang. Metode yang digunakan merupakan metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Berdasarkan riset yang telah dilakukan, kapasitas manajemen program dan manajemen proses pada Pemerintah Desa Jangkurang masih diperlukan peningkatan terhadap beberapa aspek. Faktor yang dapat diketahui adalah terdapat kekurangan dalam kepemilikan dokumen, keterlambatan pendaatan calon KPM, kondisi infrastruktur yang belum memadai, ketidakselarasan dalam proses mengenai pelaporan, dan keterbatasan akses informasi. Maka dari itu, peningkatan terhadap kapasitas manajemen program dan manajemen proses perlu dilakukan.

ABSTRACT

To support the acceleration of extreme poverty elimination, the Government of Indonesia established the Village Fund Cash Assistance (BLT-DD) program with the aim of providing direct cash assistance to residents in rural or remote areas, including Jangkurang Village. In providing BLT-DD services, good organizational capacity is required from the Jangkurang Village Government, especially in program management and process management. However, in practice, this has not been adequate. The purpose of this research is to further explain the program and process management capacity of the Jangkurang Village Government. The method used is a qualitative method through data collection techniques, namely interviews, observations, and documentation studies. Based on the research conducted, the capacity of program management and process management at the Jangkurang Village Government still needs improvement in several aspects. Factors that can be identified are the lack of document ownership, delays in registering KPM candidates, inadequate infrastructure conditions, misalignment in the process regarding reporting, and limited access to information. Therefore, improvements to the capacity of program management and process management need to be made.

PENDAHULUAN

Kemiskinan dianggap sebagai masalah yang kompleks, seringkali dikaitkan dengan ketimpangan, ketidakmampuan, dan kesulitan ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Melalui data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), penduduk miskin di Indonesia berjumlah mencapai 25,90 juta orang per Maret 2023 (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023). Masalah kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan yang serius di Indonesia.



Gambar 1. Diagram Jumlah Penduduk Miskin Menurut Wilayah

Sumber: Data diolah oleh penulis berdasarkan informasi dari laman Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia, persentase tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan lebih besar dibandingkan pada wilayah perkotaan dari jumlah penduduk miskin sebesar 25,90 juta jiwa per Maret 2023. Tingkat kemiskinan di pedesaan memiliki jumlah sebesar 14,16 juta jiwa, lebih besar dibandingkan perkotaan yang berjumlah 11,74 juta jiwa (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023a).

Dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Republik Indonesia telah mengimplementasikan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) (Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, 2022). Program BLT-DD merupakan sebuah inisiatif kebijakan bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan tujuan memberikan bantuan tunai langsung kepada penduduk yang bertempat tinggal di wilayah terpencil atau pedesaan. Hasil yang positif dari pelaksanaan program ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan implementasi BLT-DD pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
1.	Kabupaten Garut	276,7
2.	Kabupaten Cianjur	246,8
3.	Kabupaten Tasikmalaya	194,1
4.	Kabupaten Sukabumi	186,3
5.	Kabupaten Ciamis	94,0
6.	Kabupaten Pangandaran	37,9

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2023

Isu yang tengah dihadapi di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dalam peraturan tersebut salah satunya adalah tingkat kemiskinan (Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 Lampiran, 2021). Tabel di atas menunjukkan data penduduk miskin pada Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan menunjukkan bahwa Kabupaten Garut memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dibandingkan daerah lainnya sejumlah 276,7 ribu jiwa. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa Jangkurang melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa melalui empat tahapan selama periode 12 bulan, mulai dari Januari hingga Desember 2023. Bantuan tersebut disalurkan kepada 48 Keluarga

Penerima Manfaat (KPM) dengan jumlah sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) per triwulan, yang dibayarkan dalam jangka waktu tiga bulan secara sekaligus.

Pelayanan yang berkaitan dengan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah peran penting Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, dalam menyelenggarakan pelayanan BLT-DD, dibutuhkan kapasitas organisasi yang baik dari Pemerintah Desa Jangkurang. Kemampuan organisasi memegang peran penting sebagai faktor kunci dalam mengelola perubahan dalam lingkungan yang penuh dengan turbulensi dan ketidakpastian, terutama dalam era saat ini di mana perubahan terjadi dengan cepat (Heckmann et al., 2016; Hillmann & Guenther, 2021). Agar pelayanan dalam pemberian BLT-DD tepat sasaran, diperlukan pengelolaan yang tepat dari Pemerintah Desa Jangkurang. Kemampuan untuk menjamin pemanfaatan sumber daya organisasi melalui cara yang efisien dan efektif diperlukan oleh suatu organisasi sebagai kapasitas manajemen (TCC Group, 2010).

Riset yang dilakukan oleh Surya et al. (2021) menemukan fenomena bahwa kapasitas organisasi dikatakan baik karena terdapat kejelasan mengenai proses dari perencanaan dalam pengelolaan keuangan dengan mengedepankan prinsip persamaan (*equality*) serta transparansi saat melaksanakan musyawarah desa. Sejalan dengan riset selanjutnya oleh Krisjuyani (2023) dalam konteks pembangunan desa, pemerintah desa seharusnya dapat mengetahui peluang pembangunan yang diperlukan sehingga tidak diperbolehkan melakukan pembangunan yang bukan menjadi prioritas desa. Selanjutnya, pada riset oleh Rahmani & Sihombing (2023) ditemukan bahwa sistem rekrutmen yang tertutup, pelatihan yang sudah ditiadakan, serta penggunaan teknologi yang masih rendah, keterlibatan masyarakat yang belum objektif, komunikasi, dan koordinasi yang masih lemah membuat terhambatnya proses pelaksanaan suatu kegiatan. Ketiga riset tersebut memberikan pandangan bahwa pentingnya kapasitas organisasi dalam menjalankan suatu program atau kegiatan agar dapat berjalan dengan baik. Penulisan ini akan membahas spesifik mengenai kapasitas manajemen program dan proses.

Dalam penyelenggaraan yang dilakukan Pemerintah Desa Jangkurang ditemukan

beberapa indikasi masalah mengenai kapasitas manajemen yang berkaitan pada program dan proses dalam pelayanan BLT-DD, yaitu proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) oleh Pemerintah Desa Jangkurang yang dijalankan belum berjalan sesuai dengan jadwal perencanaan. Hal ini dapat dilihat melalui tanggal pelaksanaan penyaluran yang terlambat dengan jadwal pencairan yang ditetapkan. Berdasarkan data awal lapangan, terdapat keterlambatan pada penyaluran BLT-DD di tahap pertama dan kedua. Kemudian, lemahnya komunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Jangkurang dalam pelaksanaan pelayanan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Beberapa pihak KPM pada desa di wilayah bagian atas cukup sulit dalam melakukan komunikasi karena terkadang para pihak penerima bantuan memiliki keperluan mendesak dan tidak memberikan konfirmasi yang membuat penyaluran sedikit terhambat. Selanjutnya, pemantauan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Jangkurang masih lemah dalam pelayanan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Data yang tercatat mengenai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terserap pada Pemerintah Desa Jangkurang belum terorganisir secara baik.

Adapun, penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kapasitas manajemen program dan manajemen proses Pemerintah Desa Jangkurang Kecamatan Leles Kabupaten Garut dalam memberikan pelayanan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Dalam menganalisisnya, penulis menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Horton et al. (2003). Dalam teori tersebut salah satu kategori dalam kapasitas organisasi, yaitu manajemen. Pada manajemen bersangkutan terhadap upaya yang dilaksanakan untuk menciptakan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dengan tepat yang salah satu aspeknya adalah *Program and Process Management* meliputi lima komponen *operational capacities* sebagai kapasitas yang dibutuhkan organisasi untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari, yaitu: a) *Project cycle management* (manajemen siklus proyek); b) *Program planning and formulation* (perencanaan dan perumusan program); c) *Monitoring and evaluation* (pemantauan dan evaluasi); d) *Reporting* (pelaporan); dan e) *Communications* (komunikasi).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di lokasi yang sesuai dengan fokus kajian penelitian, yaitu di Desa Jangkurang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena dapat dipakai untuk mengeksplorasi serta memahami makna mengenai isu sosial atau kemanusiaan yang berasal dari individu atau kelompok menggunakan asumsi serta kerangka teoritis (Creswell, 2019). Dalam melakukan pengumpulan data, terdapat tiga metode penelitian yang digunakan, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Penelitian ini memiliki sumber data yang berasal dari data primer, yaitu beberapa informan yang dipilih dan keadaan yang diamati. Teknik *purposive* merupakan teknik yang penulis gunakan untuk menentukan informan penelitian dengan cara memilih informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu (Creswell, 2019). Informan yang menjadi sumber utama tersebut antara lain Sekretaris Desa, Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan, Kepala Dusun, Ketua RT/RW, BPD, Pendamping Desa, dan Masyarakat Penerima BLT-DD.

Selain itu, data sekunder juga menjadi sumber data yang berasal dari berbagai dokumen yang terdapat informasi yang dibutuhkan. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung kredibilitas dari penelitian ini. Setelah melakukan pengumpulan data, kemudian dianalisis berdasarkan analisis data kualitatif yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (2014) yang terdiri atas 3 tahap. Ketiga tahapan tersebut antara lain kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Jangkurang dengan mengidentifikasi komponen penting yang mempengaruhi efektivitas program. Untuk memudahkan pemahaman terkait berbagai komponen yang terlibat dalam siklus pelaksanaan program, hasil penelitian ini dirangkum dalam sebuah matriks. Matriks ini mengelompokkan lima komponen utama yang mencakup manajemen siklus proyek, perencanaan dan perumusan program, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta komunikasi. Masing-masing komponen diuraikan berdasarkan dua elemen kunci, yakni

regulasi, pemahaman, musyawarah, pengumpulan data, dan sebagainya.

Tabel 2. Matriks Penelitian

Komponen Penelitian	Cakupan Eksplanasi Penelitian	Deskripsi
<i>Project Cycle Management</i>	Regulasi	Regulasi BLT-DD berdasarkan Permendes PDTT No. 8/2022 dan PMK No. 98/2023.
	Pemahaman Program	Pentingnya pemahaman peran dan koordinasi antar pihak dalam pelaksanaan.
<i>Program Planning & Formulation</i>	Perumusan Program	Perencanaan dilakukan melalui musyawarah desa dengan melibatkan RT/RW.
	Pengumpulan Data	Data KPM dikumpulkan oleh RT/RW, membantu ketepatan, namun berpotensi terlambat.
<i>Monitoring & Evaluation</i>	Pemantauan	Pemantauan penyaluran dilakukan ke rumah KPM atau di Kantor Desa.

Komponen Penelitian	Cakupan Eksplanasi Penelitian	Deskripsi
	Evaluasi Penyaluran	Terdapat tantangan infrastruktur dan keterlibatan KPM yang optimal.
Reporting	Pelaporan	Laporan dalam bentuk Berita Acara, ditandatangani pihak terkait.
	Dokumentasi	Kepemilikan laporan terbatas yang mengurangi keterbukaan informasi.
Communications	Strategi Komunikasi	Komunikasi melalui telepon, surat, dan pertemuan.
	Umpan Balik	Tantangan pembaruan dokumen identitas dan pentingnya sosialisasi program kepada masyarakat.

Sumber: Data diolah oleh penulis dan hasil studi lapangan berdasarkan Horton et al., (2003)

Project Cycle Management

Regulasi program menjadi dasar dalam manajemen siklus proyek Pemerintah Desa Jangkurang yang membahas aturan dan hukum

yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) didasarkan pada beberapa dasar hukum, termasuk Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 8 Tahun 2022 yang mengatur Skala Prioritas Penggunaan Dana Desa. Regulasi tersebut menjadi dasar penting dalam mengalokasikan dana desa agar sesuai terhadap prioritas yang telah diputuskan. Selain itu, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2023 juga menitikberatkan pada program Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD), dengan merujuk pada peraturan seperti Permendes PDTT dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98 Tahun 2023.

Pemahaman mendalam terhadap regulasi program menjadi langkah yang tidak dapat diabaikan, karena hal ini memastikan bahwa setiap tahap proyek sesuai dengan peraturan hukum dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Desa Jangkurang mendefinisikan miskin ekstrem sebagai masyarakat yang benar-benar fakir, yang kehidupannya sepenuhnya bergantung pada BLT-DD. Peraturan tersebut mengatur bahwa penggunaan anggaran BLT-DD memiliki batas maksimal sebesar 20%, sehingga dilakukan penyesuaian antara pagu anggaran dengan data masyarakat yang layak menerima BLT-DD. Ketersediaan pedoman program ini dapat memberikan arahan dan panduan yang diperlukan oleh seluruh pihak terlibat saat pelaksanaan program. Akan tetapi, dokumentasi terhadap pemberkasan terhadap program tersebut tidak dimiliki oleh semua pihak terkait. Tanggung jawab ini lebih condong kepada satu pihak, yang memiliki kepemilikan dokumen-dokumen penting seperti peraturan dan laporan. Hal ini menunjukkan perbedaan peran yang perlu diperhatikan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Oleh karena itu, pemahaman dan koordinasi yang baik menjadi krusial untuk memastikan keselarasan dalam pelaksanaan program.

Pemahaman mendalam terhadap prosedur-prosedur ini dapat membantu Tim Pelaksana Kegiatan untuk menghindari kendala dan memastikan kepatuhan yang optimal. Pemahaman yang baik mengenai kondisi di lapangan harus sejalan dengan regulasi yang berlaku. Pihak yang terlibat dalam penyaluran sudah memiliki pemahaman mengenai tugasnya masing-masing. Terdapat satu perbedaan

mengenai siapa saja pihak yang terlibat dari hasil lapangan yang diberikan yang didasarkan pada kurangnya kepemilikan dokumen dalam manajemen siklus proyek terhadap program BLT-DD. Perbedaan ini menyoroti pentingnya koordinasi dan komunikasi yang lebih baik antarpihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Program Planning and Formulation

Pada proses perumusan program, musyawarah desa yang dilakukan pada awal tahun antara Pemerintah Desa dan pihak RT/RW menjadi fondasi penting. Proses selanjutnya menyoroti integrasi proses perumusan program dengan kapasitas manajemen program. Tak sekadar serangkaian langkah administratif, perumusan program memerlukan kebijaksanaan Pemerintah Desa dalam pengelolaan program. Langkah-langkah perencanaan dimulai dengan menghitung persentase dari pagu anggaran yang dapat digunakan untuk BLT-DD. Setelah itu, alokasi dana dibagikan ke setiap RW dan dirinci ke beberapa RT berdasarkan perhitungan yang melibatkan faktor RW, RT, dan kondisi lingkungan masyarakat. Rincian perhitungan ini kemudian dicantumkan dalam APBDes.

Peran sentral musyawarah desa yang dilakukan setiap tahun, melibatkan pihak RT/RW dan tokoh masyarakat. Dalam konteks ini, RT/RW memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi dari desa ke masyarakat. Pada proses musyawarah desa berlangsung, diberitahukan kepada seluruh pihak terkait informasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dimana pada tahapan pertama diperlukan adanya pendataan mengenai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Terdapat empat tahap penerimaan, di mana pergantian KPM bergantung pada kesepakatan antara pihak RT/RW. Padahal secara administratif tidak boleh dilakukan pergantian KPM, namun kebutuhan terkait kondisi di lapangan berbeda. Hal tersebut dianggap tidak masalah dilakukan selama tidak melawan aturan sehingga keadaan masyarakat juga kondusif.

Proses pengumpulan data calon KPM menunjukkan kebijaksanaan pemerintah Desa dalam menentukan langkah-langkah strategis. Menunggu data dari RT/RW dianggap sebagai langkah efektif bagi Pemerintah Desa dalam mengambil keputusan yang lebih tepat terkait dengan penerimaan Bantuan Langsung Tunai

Dana Desa (BLT-DD). Keterlibatan tingkat RT/RW dalam proses ini tidak hanya mengoptimalkan efektivitas program bantuan sosial, tetapi juga menciptakan kolaborasi yang baik antara pemerintah Desa dan tingkat RT/RW. Akan tetapi, keputusan ini bisa menyebabkan potensi keterlambatan dalam penyaluran BLT-DD, terutama jika proses pengumpulan data oleh tingkat RT/RW memakan waktu yang cukup lama. Pihak RT/RW mungkin mengalami kendala dalam mengumpulkan data dari seluruh wilayahnya, terutama jika memiliki tingkat partisipasi yang rendah dari masyarakat atau kondisi geografis yang sulit diakses.

Monitoring and Evaluation

Sistem pemantauan dan evaluasi program BLT-DD pada tahun 2023 menunjukkan beberapa perubahan signifikan. Pada periode baru mulai melakukan pemantauan secara langsung pada tahap kedua penyaluran yang menunjukkan peningkatan dalam pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Proses penyaluran dilakukan dengan mendatangi langsung rumah masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal ini menunjukkan upaya untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran kepada yang bersangkutan secara langsung. Akan tetapi, di tahap ketiga dan keempat, khusus terdapat salah satu dusun yang penyalurannya dilakukan di Kantor Desa karena jarak yang cukup dekat.

Meskipun demikian, perubahan ini juga dapat menimbulkan pertanyaan terkait keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penyaluran, terutama jika lokasi yang dianggap terjangkau ternyata menciptakan kendala bagi sebagian KPM. Pentingnya waktu juga tercermin dalam proses penyaluran, di mana penyaluran dilakukan selama satu hari karena hanya terdapat 48 KPM. Penekanan pada waktu yang singkat menimbulkan pertanyaan terkait akurasi dan kepastian data yang terkumpul selama proses tersebut.

Tantangan dalam proses pemantauan dan evaluasi program BLT-DD menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Salah satu kendala yang muncul adalah keinginan sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk diwakilkan dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Hal ini menjadi suatu kekhawatiran karena bantuan tersebut ditakutkan tidak akan sampai kepada pihak KPM yang bersangkutan dan berisiko tidak

tepat sasaran. Selain itu, kondisi infrastruktur yang kurang memadai dapat memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran proses penyaluran BLT-DD. Akses jalan yang sulit dapat menghambat mobilitas tim pelaksana dan memperlambat distribusi bantuan.

Reporting

Kapasitas manajemen dalam konteks pengelolaan program dan proses memiliki dampak langsung pada kualitas dan efektivitas pelaporan. Dalam konteks ini, beberapa poin krusial terkait dengan pelaporan perlu diperhatikan. Laporan yang baik sudah pasti memiliki struktur dan format yang terorganisir. Laporan untuk program BLT-DD berbentuk Berita Acara berisikan tanda terima terkait pelaksanaan penyaluran. Laporan tersebut disusun setelah proses penyaluran telah selesai dilaksanakan dan kemudian akan direkapitulasi ke dalam laporan tahunan.

Dalam rangka memberikan pelayanan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), sasaran penyampaian laporan seharusnya melibatkan sejumlah pihak yang memiliki peran dan kewenangan masing-masing. Sekretaris Desa memegang tanggung jawab untuk menyusun Berita Acara setiap penyaluran selesai dilaksanakan. Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitasnya, Berita Acara ini diketahui dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait, termasuk Kepala Dusun, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Penanggung Jawab Kegiatan, dan Kepala Desa. Proses penandatanganan oleh para pemangku kepentingan tersebut bertujuan untuk memberikan legitimasi kepada informasi yang disampaikan dalam laporan.

Ketepatan waktu pelaporan dalam memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) menjadi faktor kunci untuk memastikan kelancaran dan efisiensi program tersebut. Keberhasilan sasaran penyampaian laporan tergantung pada kerja sama yang baik antara para KPM dan petugas lapangan. Partisipasi pemangku kepentingan lokal menjadi krusial dalam memastikan transparansi dan aksesibilitas informasi terkait kegiatan tersebut. Namun, tampaknya terdapat kendala dalam distribusi dan kepemilikan laporan. Saat ini, laporan hanya dimiliki oleh salah satu pihak saja yang mungkin dapat mengurangi keterbukaan informasi bagi pemangku kepentingan lokal lainnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kontrol dan

kepemilikan data, karena kemandirian desa dalam pelaporan menjadi terbatas.

Communications

Dalam penyelenggaraan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Jangkurang, peran dan strategi komunikasi dari beberapa pemangku kepentingan memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran program. Pemerintah Desa harus memiliki pemikiran yang bijak. Hal ini dapat dilakukan dengan menyempatkan waktunya untuk turun langsung ke lapangan agar dapat memiliki pemahaman yang mendalam tentang realitas yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Jangkurang, berbagai pihak terlibat dalam komunikasi menggunakan berbagai media. Pendekatan komunikasi yang inklusif dengan berkoordinasi melalui telepon dan pertemuan langsung di Kantor Desa. Upaya untuk memperkuat kesinergisan Pemerintah Desa dengan *stakeholder* lainnya ditunjukkan dengan memberikan surat.

Sebuah tantangan muncul ketika ada individu yang telah memenuhi syarat untuk menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), tetapi kuota penerimaan hanya satu orang setiap RT. Dalam menghadapi situasi ini, partisipasi aktif dari pihak RT membuktikan pentingnya koordinasi lokal. Hal pertama yang dilakukan adalah memunculkan isu ini dalam forum musyawarah RT/RW sesuai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam diskusi tersebut, kesepakatan RT dan RW diambil sebagai acuan dalam merancang skema pergantian yang adil dan transparan. Keputusan tersebut merupakan hasil dari partisipasi dan pemikiran kolektif pemangku kepentingan lokal, yang memastikan bahwa keadilan dan keterbukaan tetap terjaga.

Selanjutnya, umpan balik dari masyarakat membuktikan nilai yang sangat penting dalam menilai dan mengatasi kendala yang muncul selama pelaksanaan program. Salah satu tantangan yang diidentifikasi adalah kondisi identitas dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih menggunakan dokumen lama. Umumnya, masyarakat kurang memberikan perhatian terhadap pembaruan dokumen tersebut karena kurangnya keterbukaan terhadap akses informasi. Pemberian pengetahuan mengenai program kepada masyarakat menjadi aspek penting dalam

menjembatani kesenjangan pemahaman dan mengatasi potensi kecemburuan di antara masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan, dapat diberikan kesimpulan bahwa Kapasitas Manajemen Program dan Manajemen Proses Pada Pemerintah Desa Jangkurang Kecamatan Leles Kabupaten Garut dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) masih belum memadai karena beberapa aspek. Pada aspek *Project Cycle Management* diketahui masih terdapat kekurangan dalam kepemilikan dokumen mengenai pedoman mengenai pelaksanaan program BLT-DD. Kemudian, pada aspek *Program Planning and Formulation*, keterlambatan pendaan calon KPM menjadi penyebab terhambatnya ketepatan waktu dalam pencairan dana BLT-DD.

Selanjutnya, dalam aspek *Monitoring and Evaluation*, dalam proses evaluasi, adanya keinginan pihak KPM untuk diwakilkan dan akses jalan yang belum memadai. Pada aspek *Reporting* diketahui bahwa terdapat ketidaksiarasan dalam proses mengenai pelaporan. Adapun, dalam aspek *Communications*, komunikasi kepada berbagai pihak terlibat telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Jangkurang, namun masih adanya hal yang kurang keterbukaan sehingga menyebabkan keterbatasan akses informasi mengenai program BLT-DD.

Dengan demikian, Pemerintah Desa Jangkurang belum menunjukkan kapasitas manajemen program dan manajemen proses yang kuat dalam memberikan pelayanan BLT-DD. Oleh karena itu, dengan menerapkan perbaikan melalui peningkatan kapasitas yang dimiliki dapat lebih meningkatkan kapasitas manajemen proses dan manajemen program Pemerintah Desa Jangkurang.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023a). *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Wilayah (Juta Jiwa), 2022-2023*. <https://www.bps.go.id/indicator/23/183/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-wilayah.html>

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023b). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. *Badan Pusat Statistik*, 57, 1–8. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>

Heckmann, N., Steger, T., & Dowling, M. (2016). Organizational capacity for change, change experience, and change project performance. *Journal of Business Research*, 69(2), 777–784. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.07.012>

Hillmann, J., & Guenther, E. (2021). Organizational Resilience: A Valuable Construct for Management Research? *International Journal of Management Reviews*, 23(1), 7–44. <https://doi.org/10.1111/ijmr.12239>

Horton, D., Alexaki, A., Bennett-lartey, S., Brice, K. N., Campilan, D., Carden, F., Silva, J. D. S., Duong, L. T., Khadar, I., Boza, A. M., Muniruzzaman, I. K., Perez, J., Chang, M. S., Vernooy, R., & Watts, J. (2003). *Evaluating Capacity Development: Experiences From Research And Development Organizations Around The World*. The Netherlands: International Service for National Agricultural Research (ISNAR); Canada: International Development Research Centre (IDRC); the Netherlands: ACP-EU Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA).

Krisjuyani, S. (2023). Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Desa. *FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 21(1). <https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.735>

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 Lampiran, JDIH BPK RI 1 (2021).

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023, (2022).

Rahmani, L., & Sihombing, T. (2023). Kapasitas Perangkat Pemerintahan Desa

Dalam Mengelola Dana Desa Di Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli *Journal of Science and ...*, 4307(June), 516–523.
<https://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/view/1339%0Ahttps://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/download/1339/986>

Surya, I., Mulka, S. R., & ... (2021). Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Maju Tahun 2019 (Studi Pada Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik *MODERAT: Jurnal Ilmiah ...*, 7(6), 326–342.
<https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/2443%0Ahttps://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/download/2443/1866>

TCC Group. (2010). *Fortifying L.A.'S Nonprofit Organizations: Capacity-Building Needs And Services In Los Angeles County* (Issue September).